

**PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Resiana Artiara

ABSTRAK

Administrasi Kependudukan di Indonesia menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pembangunan. Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun membuat pemerintah harus lebih teliti memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan pesat menimbulkan beragam permasalahan baik di bidang ekonomi, sosial, politik dan pembangunan, serta kesejahteraan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara. Data tersebut diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan administrasi kependudukan di Kota Bandar Lampung sudah mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 37 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 38 Tahun 2007. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali) yang mengatur mengenai teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan yang ada hanya Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Perwali No. 9 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada bidang pendaftaran penduduk yang meliputi KK, KTP surat pindah, akta kelahiran dan akta kematian sudah berjalan baik.

Kata kunci: Pengaturan Administrasi Kependudukan di Kota Bandar Lampung